

**OPTIMALISASI SARANA PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPT PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA, DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR**

Anita Evilia¹, M.Kendry Widiyanto²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: anitaevilia06@gmail.com, kenronggo@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Peningkatan tenaga kerja global dalam era globalisasi meningkat tinggi sehingga hal yang perlu diperhatikan terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan tenaga kerja migran Indonesia. Mengenai sistem online yang dijalankan UPT Pelayanan dan perlindungan tenaga kerja, dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang masih belum dipahami oleh para calon pekerja serta lambannya penempatan para pekerja. Untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan optimalisasi sarana pelayanan di UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan yaitu pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya didapatkan melalui mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Hasil penelitian menemukan berbagai permasalahan terutama dalam sistem online yang belum banyak dipahami oleh calon pekerja migran serta lambatnya proses penempatan para pekerja. Dalam mengatasi permasalahan ini, dengan mengoptimalkan sarana pelayanan yang ada di UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Melalui penelitian ini, sistem online yang dijalankan oleh dinas terkait diharapkan dapat mempermudah para calon pekerja mendapatkan layanan terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran serta memperkuat posisi Indonesia dalam konteks mobilitas tenaga kerja global

Kata Kunci : Optimalisasi, Pelayanan, Pekerja Migran, Transmigrasi

ABSTRACT

The increase in the global workforce during the era of globalization has risen significantly, making it crucial to pay attention to issues related to Indonesian migrant workers. Regarding the online system managed by the UPT (Service and Protection Unit for Workers) under the Department of Manpower and Transmigration of East Java Province, it is still not well understood by prospective workers, and the placement of workers remains slow. To address these issues, efforts are made to optimize the service facilities at the UPT Service and Protection Unit for Workers, Department of Manpower and Transmigration of East Java Province. This research employs a qualitative method, collecting data by sourcing and reconstructing from various materials such as books, journals, and existing research. The qualitative research is conducted with a design where the findings are derived from revealing phenomena in a holistic-contextual manner through data collection. Qualitative research is descriptive in nature and tends to use an inductive approach in its analysis, emphasizing the process and meaning based on the subject's perspective. The research findings highlight several problems, particularly the online system, which is not widely understood by prospective migrant workers, as well as the slow process of worker placement. To overcome these challenges, service facilities at the UPT Service and Protection Unit for Workers under the Department of Manpower and Transmigration of East Java Province must be optimized. Through this research, the online system run by the relevant agency is expected to facilitate prospective workers in accessing services related to the placement of Indonesian migrant workers. This is hoped to provide a positive contribution to the protection and welfare of migrant workers, while also strengthening Indonesia's position in the context of global workforce mobility.

Keywords: Optimization, service, Migrant Workers, Transmigration

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pelayanan publik telah menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Sektor ketenagakerjaan, khususnya perlindungan tenaga kerja, memegang peran strategis dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi dan dipenuhi secara optimal. Dalam konteks ini, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja yang berada dibawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan layanan yang sesuai dengan regulasi dan standar yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2015, berdasar Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri dan amanah Permenaker No 30 Tahun 2016, Jawa Timur dibantu Kemnaker RI mendirikan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PLTSA-PTKLN). Layanan Terpadu ini didirikan sebagai upaya perbaikan tatakelola penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Bersama di Jawa Timur, inisiasi awal pendirian PLTSA-PTKLN selain di Jawa Timur juga didirikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kab. Gianyar Prov. Bali.



Gambar 1. Alur Proses layanan di LTSA

Serta berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk mendukung optimalisasi layanan di sektor ini, antara lain **Undang-Undang No. 18 Tahun 2017** tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi pekerja migran secara komprehensif dari pra- penempatan hingga kepulangan. Lebih lanjut, **Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021** yang merupakan aturan turunan dari UU No. 18 Tahun 2017 memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan perlindungan bagi pekerja migran. Selain itu, **Permenaker No. 9 Tahun 2019** tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri mengatur mekanisme layanan penempatan tenaga kerja yang lebih baik dan terstandar, baik untuk tenaga kerja domestik maupun pekerja migran (Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, 2021).

Di tingkat daerah, **Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 2 Tahun 2023** memberikan pedoman lebih spesifik untuk penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan, termasuk perlindungan tenaga kerja dan peningkatan mutu sarana prasarana pelayanan di lingkungan UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Pergub ini menekankan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sistem pelayanan berbasis teknologi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung efektivitas layanan.

Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, dalam praktiknya, optimalisasi sarana pelayanan di lingkungan UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia yang belum sepenuhnya terlatih, serta sistem pelayanan yang belum sepenuhnya terintegrasi sering kali menjadi kendala dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Hal ini berpotensi menghambat terlaksananya perlindungan tenaga kerja, terutama bagi pekerja migran dan tenaga kerja domestik yang memerlukan akses cepat terhadap layanan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aktual sarana dan prasarana di lingkungan UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja, serta mengidentifikasi strategi optimalisasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung implementasi regulasi secara optimal, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam UU No. 18 Tahun 2017, PP No. 59 Tahun 2021, Permenaker No. 9 Tahun 2019, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 2 Tahun 2023 (UPT P2TK DISNAKERTRANS PROV. JATIM, n.d.).

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam upaya optimalisasi sarana pelayanan di lingkungan UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi perspektif para pemangku kepentingan mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas sarana pelayanan yang ada.

1. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan menggambarkan kondisi aktual sarana pelayanan dan langkah-langkah optimalisasi yang telah atau dapat dilakukan di UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Peneliti berupaya memahami bagaimana sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia digunakan dan dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, serta bagaimana upaya optimalisasi dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Subjek penelitian terdiri dari berbagai aktor yang berperan dalam pelayanan, yaitu:

- **Pegawai UPT** yang bertanggung jawab dalam proses pelayanan.
- **Tenaga kerja** yang menjadi pengguna layanan UPT, baik tenaga kerja domestik maupun pekerja migran.
- **Pemangku kepentingan lain** yang terkait dengan proses pelayanan, seperti pejabat dinas, perwakilan serikat pekerja, dan mitra kerja terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

- **Wawancara mendalam (*in-depth interview*):** Teknik ini digunakan untuk menggali informasi dari pegawai UPT, tenaga kerja, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pengalaman, persepsi, dan evaluasi mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh UPT. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi isu-isu penting yang muncul selama wawancara.
- **Observasi langsung:** Peneliti melakukan observasi terhadap sarana dan prasarana pelayanan di UPT serta proses interaksi antara pegawai dengan tenaga kerja. Observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana sarana pelayanan digunakan dalam operasional harian dan mengidentifikasi potensi masalah yang mempengaruhi kualitas pelayanan.
- **Studi dokumentasi:** Peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai dokumen resmi, seperti laporan tahunan, kebijakan internal, dan peraturan yang berlaku (termasuk Permenaker No. 9 Tahun 2019). Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk memahami kerangka kerja yang digunakan UPT dalam memberikan pelayanan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah-langkah analisis tematik dalam penelitian ini meliputi:

- **Pengorganisasian data:** Data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan dan dikategorikan berdasarkan topik-topik utama seperti kondisi sarana pelayanan, kendala yang dihadapi, dan strategi optimalisasi.
- **Pengkodean (*coding*):** Setelah data diorganisasikan, peneliti melakukan pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema yang relevan. Tema-tema ini berfokus pada aspek-aspek penting dari optimalisasi sarana pelayanan, seperti efisiensi penggunaan infrastruktur, perbaikan prosedur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- **Interpretasi:** Setelah tema-tema diidentifikasi, peneliti menginterpretasikan data dengan menghubungkannya pada teori atau kebijakan yang relevan, seperti standar pelayanan publik yang diatur dalam Permenaker No. 9 Tahun 2019. Interpretasi ini kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi dalam rangka optimalisasi sarana pelayanan di UPT.

5. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi, di mana peneliti membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Selain itu, peneliti juga melakukan member checking dengan meminta para responden meninjau kembali hasil wawancara guna memastikan akurasi interpretasi data yang diberikan. (Lestari et al., 2023).

HASIL dan PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018 BAB VI Pasal 21 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam pelayanan pemrosesan dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaikan masalah Tenaga Kerja Luar Negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi pada pra dan purna penempatan, tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018 BAB VI Pasal 22 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja memiliki fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. Pelaksanaan dukungan teknis sosialisasi dan penyuluhan kepada calon dan keluarga Tenaga Kerja Luar Negeri serta Masyarakat Umum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perlindungan Calon dan Tenaga Kerja Luar Negeri pada pra penempatan dan purna penempatan;
- d. Pelaksanaan dukungan teknis pengumpulan data, pemberian layanan informasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;
- e. Pelaksanaan pembekalan teknis akhir pemberangkatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
- f. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi Calon Tenaga Kerja Luar Negeri melalui penempatan oleh Pemerintah (*Government to Government, dan Government to Private*);
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi;
- h. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah Calon dan Tenaga Kerja Luar Negeri pra dan purna penempatan;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah Tenaga Kerja Luar Negeri;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap (LPTSA);
- k. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018 BAB VI Pasal 20 Ayat (1) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terdiri atas :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Penyiapan, Penempatan dan Pemasyarakatan Program;
3. Seksi Perlindungan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Penempatan.

KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rincian pegawai di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) sebagai berikut :

- Kepala UPT : 1 Orang
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 Orang
- Kepala Seksi Penyiapan Penempatan dan Pemasyarakatan Program dan Kepala Seksi Perlindungan Pemberdayaan dan Kelembagaan Penempatan : 1 Orang
- Kepala Seksi Perlindungan Pemberdayaan dan Kelembagaan : 1 Orang
- Staf Aparatur Sipil Negara : 15 Orang
- Staf Pegawai Tidak Tetap : 11 Orang
- Outsourcing : 3 Orang

SARANA DAN PRASARANA

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) mempunyai sarana dan prasarana sebagai berikut :

- Gedung kantor;
- Ruang rapat;
- Aula;
- Ruang kelas untuk OPP;
- Masjid;
- Gedung Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA);
- Kamar mandi untuk peserta OPP;
- Kantin;
- Lahan parkir;
- Mobil ambulance sebanyak 2 buah;
- Kendaraan roda 4 sebanyak 3 buah;
- Ruang Unit Pemberdayaan Pekerja Migran simPADU-PMI;
- Mobil Unit Keliling Pemberdayaan simPADU-PMI.

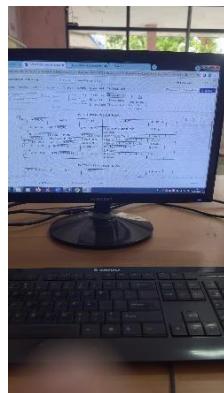
KEGIATAN LAYANAN PMI YANG BERKAITAN DENGAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP (LTSA) :

Di pelayanan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Jatim di Jalan Bendul Merisi No 2 Surabaya, tergabung sebanyak 7 (tujuh) instansi dengan layanan sebagai berikut :

- **Loket Disnakertrans Prov. Jatim** : Pelayanan legalisasi perjanjian penempatan, Pelayanan Pembuatan Paspor PMI, Layanan edit data PMI, Pengaduan dan informasi kerja ke luar negeri.
- **Loket BP2MI** : Pengurusan verifikasi dokumen, Orientasi Pra Pemberangkatan dan elektronik kartu tenaga kerja luar negeri atau e-KTKLN.
- **Loket Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim** : pengecekan data administrasi kependudukan (KTP, KK dan Akte) secara online.
- **Loket Dinas Kesehatan Prov. Jatim** : pengurusan surat pengantar untuk melakukan medical chek up di fasilitas sarana kesehatan yang ditunjuk.
- **Loket Polda Jatim** : pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (skck) dari Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk calon PMI yang akan bekerja di negara negara tertentu (misalnya taiwan).
- **Loket BPJS Ketenagakerjaan** : pengurusan kepesertaan program jaminan perlindungan tki, sekaligus klaim asuransi jika terjadi kasus-kasus sesuai jaminan yang diberikan.
- **Loket Imigrasi** : penerbitan paspor.

Selain itu, terdapat instansi/lembaga pendukung yakni Bank Jatim dan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) serta Bursa Kerja/Konsultasi/Info Lembaga Sertifikasi Profesi di ruang simPADU-PMI.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) juga memiliki simPADU - PMI atau Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia) yang bertujuan untuk **Penanganan Aduan dan Konsultasi**: Menyediakan saluran bagi pekerja atau perusahaan untuk mengajukan aduan atau meminta konsultasi terkait isu-isu Ketenagakerjaan (Disnakertrans Jatim, n.d.).

Merekap data pengunjung yang datang dari setiap bulan

Gambar . Contoh Aplikasi SIMPADU-PMI

SIMPADU-PMI ini memiliki sasaran untuk para pencari kerja perusahaan dan pengusaha ketenagakerjaan migran serta terdapat tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan ketenagakerjaan, sehingga mereka dapat lebih mudah mencari peluang kerja.

Berdasarkan observasi yang dilakukan Selama periode yang berlangsung dari tanggal 9 September hingga 1 November 2024, telah disepakati bahwa jam kerja dimulai pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 16.00, dengan waktu istirahat selama 60 menit dari pukul 12.00 hingga 13.00. Penulis menjalani jadwal ini selama 5 hari kerja, dari Senin hingga Jumat.

Pada minggu pertama, penulis mendapatkan kesempatan untuk ditempatkan di SIMPADU, sebuah platform inovatif yang dikembangkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT-P2TK). SIMPADU-PMI (Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu – Pekerja Migran Indonesia), yang diluncurkan pada 19 Februari 2018, merupakan sebuah terobosan penting dalam mempermudah akses informasi dan layanan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tujuan utama dari platform ini adalah untuk menyediakan akses yang cepat dan akurat terhadap berbagai informasi krusial yang dibutuhkan oleh calon PMI, termasuk daftar lowongan kerja di luar negeri, persyaratan, dan prosedur yang harus dipenuhi sebelum mereka dapat bekerja secara legal di luar negeri. SIMPADU-PMI juga dirancang untuk memberikan layanan komprehensif bagi calon PMI, dengan menyediakan ruang konsultasi dan pengaduan yang terintegrasi dengan berbagai layanan pelatihan, sertifikasi, dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

Hal ini sangat membantu calon PMI dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, serta memberikan perlindungan hukum yang diperlukan dalam proses bekerja di luar negeri. Dengan integrasi layanan tersebut, calon PMI tidak hanya memperoleh akses informasi yang lebih mudah, tetapi juga dapat memproses kebutuhan administratif mereka secara lebih efisien dan transparan. (Diah Ayu Puspita Rani, 2019)

Dengan adanya SIMPADU-PMI, proses pengelolaan tenaga kerja migran menjadi lebih transparan, terstruktur, dan terintegrasi, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dalam sektor ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan konsep administrasi negara yang mengutamakan pelayanan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. Legalisasi surat PMI
2. Pengecekan data administrasi PMI
3. Pendataan kedatangan PMI dari luar negeri
4. Pengelolahan data PMI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam kualitas layanan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Peningkatan ini terjadi sebagai hasil dari serangkaian optimalisasi yang dilakukan untuk mempermudah akses calon pekerja migran terhadap berbagai informasi penting. Informasi tersebut mencakup penempatan kerja, tata cara pendaftaran, hingga prosedur pengaduan jika terjadi permasalahan, yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau oleh mereka.

Faktor-faktor kunci yang mendukung peningkatan layanan ini meliputi kolaborasi yang erat antara sektor swasta dan pemerintah, penggunaan teknologi melalui sistem pelayanan berbasis online, serta peningkatan fasilitas fisik yang lebih memadai. Selain itu, adanya respon positif dari para calon PMI terhadap perbaikan layanan dan inovasi yang diimplementasikan turut berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Inovasi ini tidak hanya mempermudah calon pekerja migran dalam mengakses informasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pelayanan.

Dengan demikian, upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses pelayanan bagi PMI di Provinsi Jawa Timur masih perlu dilanjutkan. Optimalisasi yang sudah dilakukan di UPT P2TK harus dilihat sebagai langkah awal dari sebuah proses yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, peningkatan fasilitas, peningkatan pemahaman masyarakat tentang sistem online, serta inovasi yang berkelanjutan diharapkan dapat menjadikan layanan yang diberikan semakin baik, lebih responsif, dan lebih sesuai dengan kebutuhan para pekerja migran.

Saran

Saran yang diberikan dalam meningkatkan dan mengevaluasi kualitas pelayanan di UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Disnakertrans Jatim pada proses penempatan meliputi:

1. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi.

Meningkatkan sosialisasi kepada calon PMI mengenai prosedur pelayanan dan penggunaan sistem online yang ada dan mengimplementasikan program edukasi yang lebih intensif terkait hak dan kewajiban PMI, serta informasi terkini terkait regulasi dan kebijakan terkait pelayanan yang ada di UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

2. Peningkatan Fasilitas Pendukung.

Menyediakan fasilitas tambahan seperti fotokopi dan print untuk memudahkan calon PMI dalam pengurusan administrasi dan memperhatikan aspek kebersihan dan kenyamanan fasilitas, termasuk kamar mandi, guna meningkatkan pengalaman para PMI.

3. Pengembangan Sistem Online.

Terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap sistem online, serta memberikan pelatihan kepada calon PMI untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap penggunaan sistem tersebut dan memastikan kehandalan dan keamanan sistem online untuk menghindari potensi masalah teknis dan kerahasiaan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, I. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. *Ilmiah Medata*, 3(2), 399–405.
- Diah Ayu Puspita Rani. (2019). *Dampak Implementasi Layanan Inovasi Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia*. <https://repository.upnjatim.ac.id/6038/2/1.pdf>
- Disnakertrans Jatim. (n.d.). *UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK)*. <https://disnakertrans.jatimprov.go.id/profil/upt/upt-pelayanan-dan-pelindungan-tenaga-kerja-p2tk>
- Lestari, E. P., Putri Pertiwi, N. L., Alimuddin, A., & Asbihani, D. (2023). Minat Investasi Pekerja Migran Indonesia Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Lampung Timur. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 89–104. <https://doi.org/10.32332/finansia.v6i1.6630>
- UPT P2TK DISNAKERTRANS PROV. JATIM. (n.d.). *Sejarah Perkembangan dan Sarana Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Perkerja Migran Indonesia di Jawa Timur*.